PEMERINTAH KOTA SEMARANG

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj IP) TAHUN 2022

DINAS SOSIAL KOTA SEMARANG

DISUSUN TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2022 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan. LKj IP Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2022 merupakan bentuk komitmen nyata Dinas Sosial Kota Semarang dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuw Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja (LKj) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Adapun tujuan penyusunan LKj IP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKj IP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Demikian LKj IP kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Semarang, Februari 2023

KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA SEMARANG

HEROE SOEKENDAR, S.Sos

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii

BAB I – PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Gambaran Umum Organisasi 1
C. Aspek Strategi dan Permasalahan Utama 6
D. Landasan Hukum 6
E. Sistematika Penulisan 7

BAB II – PERENCANAAN KINERJA 8
A. Rencana Strategis 2021 - 2026 8
B. Perencanaan Kinerja 14
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 16

BAB III – AKUNTABILITAS KINERJA 19
A. Capaian Kinerja Organisasi 19
B. Analisis Capaian Kinerja 20
B.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 21
B.2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya 23
B.3. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target akhir RPJMD 26
B.4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional 27
B.5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.. 27
B.6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 28
B.7. Analisis Program / Kegiatan Tahun 2022 yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.. 30
C. Realisasi Anggaran 38

BAB IV – PENUTUP 42
A. Kesimpulan Umum 42
B. Rekomendasi 43

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Kota Semarang	12
Tabel 2.2.	Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Sosial Tahun	13
Tabel 2.3.	Perencanaan Kinerja Dinas Sosial Kota Semarang	15
Tabel 2.4.	Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2022	16
Tabel 3.1.	Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022	21
Tabel 3.2.	Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya	24
Tabel 3.3.	Perbandingan realisasi kinerja dengan target akhir RPJMD	26
Tabel 3.4.	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	28
Tabel 3.5.	Analisis Program/Kegiatan Tahun 2022 yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	31
Tabel 3.6.	Realisasi Anggaran Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2022	38
Tabel 3.7.	Rincian Realisasi Anggaran Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2022	38

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Guna lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (result oriented governement), perlu adanya sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas tersebut perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Dokumen LKjIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD, Indikator Kinerja Utama (IKU), Penetapan Kinerja (PK) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Sesuai dengan siklusnya, pada saat ini pemerintah daerah menyusun LKj IP 2022 dan Penetapan Kinerja (PK) 2023. LKj IP adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Laporan Akuntabilitas Kinerja berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Sedangkan Dokumen PK/TAPKIN merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dokumen Penetapan Kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran.

B. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Berdasarkan ketentuan umum dalam pasal 1 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 tahun 2016 tersebut, Dinas Sosial Kota Semarang mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

B.1. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

Sesuai Peraturan Walikota Semarang Nomor 99 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Sistem Kerja Dinas Sosial Kota Semarang.

Atas dasar tugas pokok tersebut diatas, yang menjadi tanggung jawab dan fungsi Dinas Sosial antara lain :

1. Perumusan kebijakan Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Jaminan Sosial, dan Bidang Perlindungan Sosial;
2. Perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota;
3. Pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Jaminan Sosial, dan Bidang Perlindungan Sosial, dan UPTD;
4. Penyelenggaraan manajemen kinerja pegawai Dinas;
5. Penyelenggaraan kerja sama Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Jaminan Sosial, dan Bidang Perlindungan Sosial;
6. Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas;
7. Penyelenggaraan program dan Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Jaminan Sosial, dan Bidang Perlindungan Sosial, dan UPTD;
8. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Jaminan Sosial, dan Bidang Perlindungan Sosial, dan UPTD;
9. Penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
10. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya

B.2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Walikota Kota Semarang nomor 99 Tahun 2021, susunan organisasi Dinas Sosial Kota Semarang terdiri dari ;

a. Kepala Dinas :
b. Sekretariat, terdiri atas :
    1. Sub Bagian Keuangan dan Barang Milik Daerah;
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
    3. Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi.
c. Bidang Pemberdayaan Sosial, terdiri atas :
    1. Sub Koordinator Pengelolaan Sumber Dana;
    2. Sub Koordinator Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial dan Keluarga; dan
    3. Sub Koordinator Kelembagaan dan Kepahlawanan.

d. Bidang Rehabilitasi Sosial, terdiri atas :
   1. Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial Dasar PMKS;
   2. Sub Koordinator Pemberian Layanan Kebutuhan Dasar PMKS Lainnya; dan
   3. Sub Koordinator Pemberian Layanan Bimbingan PMKS Lainnya.

e. Bidang Jaminan Sosial, terdiri atas :
   1. Sub Koordinator Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial;
   2. Sub Koordinator Bantuan Kesejahteraan Keluarga; dan
   3. Sub Koordinator Pengembangan Ekonomi Masyarakat

f. Bidang Perlindungan Sosial, terdiri atas :
   1. Sub Koordinator Perlindungan Sosial Anak Terlantar dan Warga Negara Migran;
   2. Sub Koordinator Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial; dan
   3. Sub Koordinator Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana.

g. UPTD Balai Rehabilitasi Sosial Among Jiwo;

h. Jabatan Fungsional.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL KOTA SEMARANG

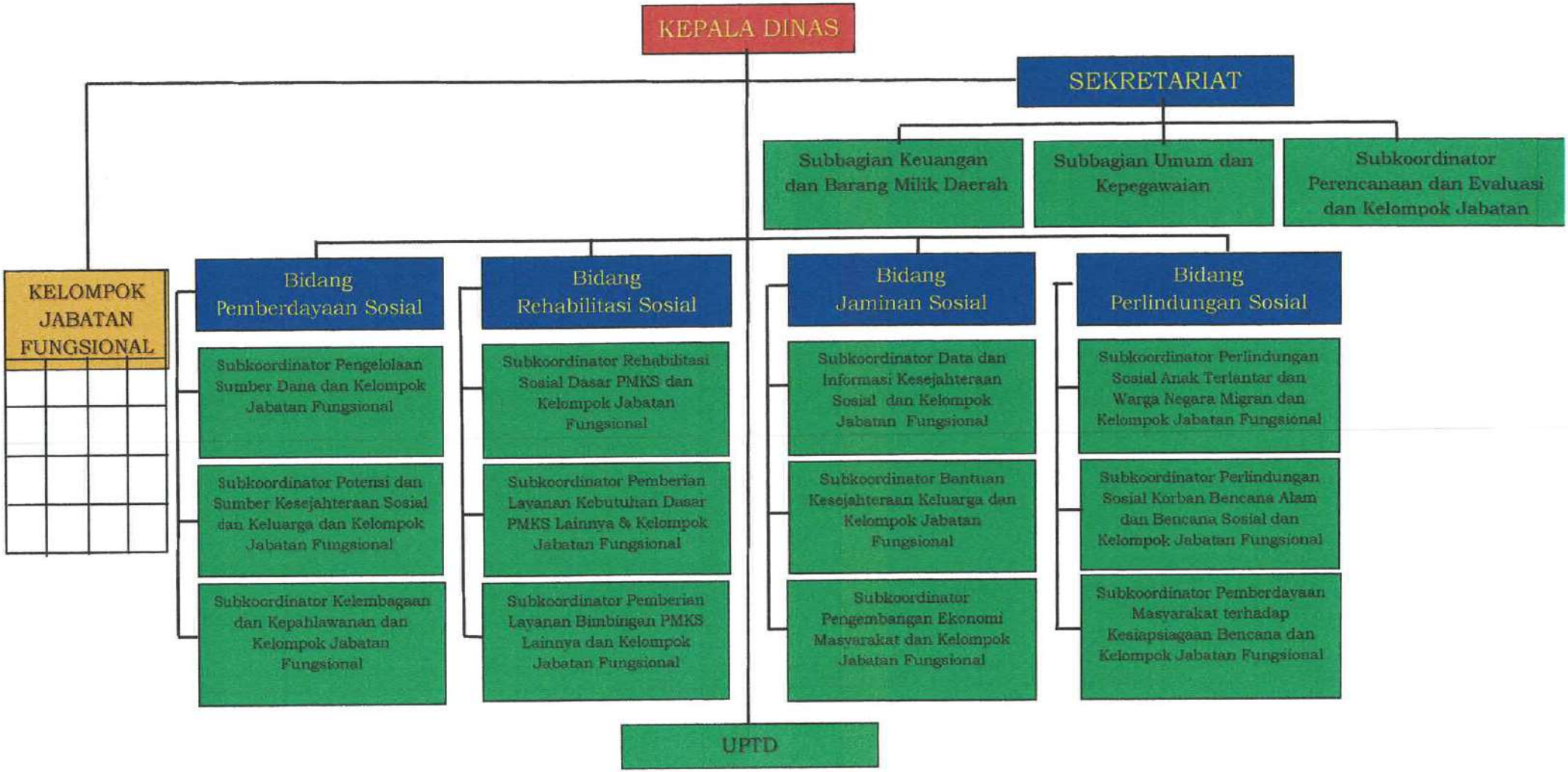

B. 3. Sumberdaya Manusia

Sumber daya manusia merupakan modal dasar bagi kelangsungan aktivitas kerja organisasi, karena organisasi itu sendiri pada hakekatnya adalah kerja sama antar manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu mekanisme dan sistem yang ada dalam organisasi akan bermuara pada satu sumber, yaitu manusia.

Selanjutnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang dimiliki organisasi akan sangat menentukan kinerja dari organisasi itu sendiri. Suatu organisasi akan mampu mengembangkan potensinya, hal ini sangat ditentukan oleh seberapa jauh kemampuan sumber daya manusianya, seberapa besar kemampuan anggarannya, bagaimana sistem informasi dan teknologi yang diterapkan, seberapa besar sarana dan prasarana yang tersedia dan seberapa besar kompetensi yang dimiliki. Dan yang lebih penting adalah bagaimana sumber daya yang dimiliki dapat didayagunakan secara tepat.

Dengan kata lain seberapa besar kemampuan organisasi dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk merespon segala kondisi dan perubahan-perubahan yang terjadi pada lingkungannya. Memang sulit untuk mengukur tingkat kemampuan seseorang dalam sebuah organisasi, khususnya organisasi publik. Namun beberapa standar umum yang dapat digunakan dalam tulisan ini antara lain jumlah pegawai, status kepegawaian dan tingkat pendidikan.

Dilihat dari perspektif sumber daya manusia, tahun 2022 Dinas Sosial memiliki SDM sebanyak 50 orang dengan komposisi menurut pendidikan : 11 (sebelas) orang berpendidikan pasca sarjana, 28 (dua puluh delapan) orang berpendidikan sarjana, 4 (empat) orang berpendidikan sarjana muda, dan 7 (tujuh) orang berpedidikan SLTA.

Sedangkan menurut pangkat dan golongan yaitu 7 (tujuh) orang golongan IV, 35 (tiga puluh lima) orang golongan III, dan 8 (delapan) orang golongan II.

B. 4. Sarana dan Prasarana

Sarana prasarana juga merupakan modal penting bagi kelancaraan aktivitas kegiatan di Dinas Sosial Kota Semarang, terutama operasional di lapangan yang sangat membutuhkan sarana prasarana terutama kendaraan bermotor.

Pada tahun 2022 Dinas Sosial Kota Semarang memiliki 44 (empat puluh empat) kendaraan bermotor dinas, dengan perincian :

a. 16 (enam belas) kendaraan roda empat untuk Kepala Dinas Sosial Kota Semarang, operasional Sekretaris Dinas Sosial Kota Semarang, operasional Ka. Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Semarang, operasional Ka. Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kota Semarang dan Ka. Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Semarang serta operasional Dinas Sosial Kota Semarang dan UPTD Panti Rehabilitasi Among Jiwo ;
b. 2 (dua) jenis Trail untuk operasional Dinas Sosial Kota Semarang ;
c. 26 (dua puluh enam) jenis Sepeda Motor untuk operasional Bidang Sekretariat, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial ;

C. ASPEK STRATEGI DAN PERMASALAHAN UTAMA

Beberapa permasalahan utama (strategic issued) yang dihadapi Dinas Sosial Kota Semarang antara lain :

Kurangnya sarana dan prasarana pendukung untuk pemenuhan pelayanan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) pada umumnya dan kepada penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti, serta korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota untuk bisa mendapatkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial khususnya.

D. LANDASAN HUKUM

a. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuw Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
b. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026.
c. Peraturan Walikota Semarang Nomor 40 tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2022.
d. Peraturan Walikota Semarang Nomor 99 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Sistem Kerja Dinas Sosial Kota Semarang.
e. Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2021-2026.
f. Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2022.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Gambaran Umum Organisasi
  - a. Kedudukan, Tugas pokok dan Fungsi
  - b. Struktur Organisasi
  - c. Sumberdaya Manusaia
  - d. Sarana dan Prasarana
- C. Aspek Strategi dan Permasalahan Utama
- D. Landasan Hukum
- E. Sistematika Penulisan

BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- A. Rencana Strategis Tahun 2021 - 2026
  1. Visi Kota Semarang
  2. Misi KotaSemarang
  3. Tujuan SKPD
  4. Sasaran serta Kebijakan SKPD
  5. Program SKPD
- B. Perencanaan Kinerja
- C. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
- C. Akuntabilitas Keuangan

BAB IV. PENUTUP

- A. Tinjauan umum keberhasilan dan kegagalan
- B. Permasalahan atau kendala utama yang berkaitan dengan kinerja SKPD
- C. Strategi pemecahan masalah

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

Pada tahun 2022 Dinas Sosial Kota Semarang bermaksud memfokuskan pencapaian sasaran utama yaitu :

1. Menurunnya angka kemiskinan
2. Terwujudnya pemerataan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi Pemerlu pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS); dan
3. Peningkatan Laporan Kinerja yang efektif, efisien dan akuntabel

Sasaran dimaksud perlu diprioritaskan dalam rangka mendukung tercapainya Visi Kota Semarang yaitu "Terwujudnya Kota Semarang yang semakin Hebat yang berlandaskan Pancasila, dalam Bingkai NKRI yang Ber-Bhinneka Tunggal Ika".

Guna mencapai sasaran dimaksud maka pada tahun 2022 Dinas Sosial Kota Semarang telah menetapkan 6 program, 16 kegiatan dan 78 sub kegiatan.

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana strategis adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang timbul. Rencana strategis Dinas Sosial Kota Semarang merupakan bagian integral dari kebijakan dan program Pemerintah Kota Semarang dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu sejak 2021 s/d 2026.

Untuk mewujudkan Renstra tentu perlu ditunjang dengan Visi dan Misi yang rasional. Untuk itu dapat diperhatikan Visi dan Misi Kota Semarang, yaitu :

1. Visi Kota Semarang

Visi merupakan suatu keadaan atau harapan yang harus diwujudkan pada masa yang akan datang. Seperti diketahui bersama bahwa Visi Pemerintah Kota Semarang adalah "Terwujudnya Kota Semarang yang semakin Hebat yang berlandaskan Pancasila, dalam Bingkai NKRI yang Ber-Bhinneka Tunggal Ika".

Makna dari visi tersebut adalah Kota Semarang yang hebat akan menjadi semakin hebat kedepannya, terbukti bahwa Kota metropolitan ini telah dapat menyelesaikan isu-isu strategis kota pada lima tahun terakhir, antara lain meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi, meningkatkan kontribusi kategori-kategori yang terkait dengan perdagangan dan jasa serta industri terhadap PDRB, meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Pembangunan

Gender, meningkatkan nilai investasi, menurunkan angka kemiskinan dan Tingkat Pengangguran Terbuka, menuntaskan rob dan banjir, serta meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi. Tataran semakin hebat dapat dimaknai bahwa lima tahun ke depan akan siap menghadapi tantangan global, problematika perkotaan yang lebih heterogen, tuntutan layanan publik yang lebih tinggi serta tetap memperhatikan wawasan lingkungan. Untuk mencapai Kota yang semakin hebat tersebut, Pemerintah Kota Semarang bersama masyarakat akan bahu-membahu membangun kota dengan berlandaskan Pancasila dalam bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika. Sehinga menjadi daerah yang kondusif dandapat mendukung pengembangan ekonomi, sosial dan budaya di masyarakat yang akhirnya dapat mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya.

Definisi SEMAKIN HEBAT dikandung pemahaman bahwa Visi tersebut melalui semangat seluruh pemangku kepentingan pembangunan kota ingin menguatkan berbagai keunggulan sebagai sebuah kota metropolitan yangmemiliki sumber daya manusia yang unggul, ekonomi berbasis kerakyatanyang berdaya saing berbasis riset dan inovasi, berkeadilan sosial, infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan, serta pelayanan publik yang dinamis untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

2. Misi Kota Semarang

Guna mewujudkan Visi tersebut dirumuskan menjadi lima misi pembangunan daerah, yaitu :

a. Meningkatkan kualitas dan kapasitas **Sumber Daya Manusia** yang Unggul dan Produktif untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial.
b. Meningkatkan potensi **ekonomi** lokal yang berdaya saing dan stimulasi pembangunan industri, berlandaskan riset dan inovasi berdasar prinsip demokrasi ekonomi pancasila.
c. Menjamin kemerdekaan masyarakat menjalankan ibadah, pemenuhan **hak dasar** dan perlindungan **kesejahteraan sosial** serta hak asasi manusia bagi masyarakat secara berkeadilan.
d. Mewujudkan **infrastruktur** berkualitas yang berwawasan lingkungan untuk mendukung kemajuan kota.
e. Menjalankan **reformasi birokrasi** pemerintahan secara dinamis dan menyusun produk hukum yang sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagaimana halnya Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih yang berpedoman pada RPJPD Kota Semarang Tahun 2005-2025, maka janji-janji yang telah disampaikan pada saat kampanye merupakan substansi yang terkait erat dengan pencapaian Visi dan Misi. Janji-janji dimaksud yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2021-2026, selanjutnya akan menjadi pedoman pembangunan selama 5 (lima) tahun dan dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah.

Dalam mendukung mewujudkan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota Semarang tersebut adalah pada misi 1 (satu) yaitu "**Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Produktif untuk Mencapai Kesejahteraan dan Keadilan Sosial**".

Misi Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Produktif untuk Mencapai Kesejahteraan dan Keadilan Sosial dengan tujuan "**Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat**, **Peningkatan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), dan Menghasilkan Laporan kinerja yang berkualitas",** sehingga diharapkan dengan meningkatnya kualitas dan kapasitas SDM yang unggul dan produktif dapat meningkatkan fungsi sosial ekonomi secara layak dan bermartabat serta dapat memutus mata rantai kemiskinan berbasis kemandirian .

Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makanan maupun non-makanan. Model tersebut membandingkan tingkat konsumsi penduduk dengan Garis Kemiskinan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Garis Kemiskinan ini akan selalu dinamis mengikuti perkembangan inflasi dan harga pemenuhan kebutuhan makanan dan non makanan.

3. Tujuan SKPD

Perumusan tujuan adalah tahap perumusan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan merupakan salah satu tahap perencanaan yang memiliki titik kritis dalam penyusunan RPJMD. Perumusan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis

daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan merupakan dasar dalam menyusun pilahan-pilahan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan dua dalam RPJMD Tahun 2021-2026 adalah

1. Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat
   (Indikator tujuan : Persentase Penduduk Miskin)
2. Peningkatan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
   (Indikator tujuan : Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani)
3. Menghasilkan Laporan kinerja yang berkualitas
   (Indikator tujuan : Persentase penyelesaian Manajemen Internal dinas sosial yang efektif, efisien dan akuntabel)

Yang merupakan tujuan dari misi satu, yaitu "Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Produktif untuk Mencapai Kesejahteraan dan Keadilan Sosial".

4. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Hasil rumusan sasaran Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

a. Menurunnya angka kemiskinan
   (Indikator Sasaran : Menurunnya Angka DTKS)
b. Terwujudnya Pemerataan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
   (Indikator Sasaran : Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani, Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti, Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota, Cakupan Potensi dan Sumber Kesejahteraan (PSKS) yang difasilitasi, Cakupan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan sosial)
c. Peningkatan Laporan kinerja yang efektif, efisien dan akuntabel
   (Indikator Sasaran : Persentase penyelesaian Manajemen Internal yang efektif, efisien dan akuntabel)

Hubungan tujuan, sasaran dengan indikator kinerja utama Dinas Sosial Kota Semarang digambarkan sebagai berikut :

Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Kota Semarang

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Pada Tahun				Kondisi Akhir
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat		Angka Kemiskinan	%	4,56	4,32	4,30	4,25	4,20	4,15
		Menurunnya Angka Kemiskinan	Menurunnya Angka DTKS	%	24,23	16,10	15,80	15,50	15,20	14,90
2	Peningkatan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	%	100	99, 75	99,81	99,87	99,93	99,99
		Terwujudnya Pemerataan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	%	100	99, 75	99,81	99,87	99,93	99,99
			Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	100	100	100	100
			Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100	100
			Cakupan Potensi dan Sumber Kesejahteraan (PSKS) yang difasilitasi	%	71,42	66,67	78	89	100	100
			Cakupan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yg memperoleh bantuan social	%	63,37	69,15	69,85	70,54	71,25	71,96
2	Menghasilkan Laporan kinerja yang berkualitas		Persentase penyelesaian Manajemen Internal dinas sosial yang efektif, efisien dan akuntabel	%	100	100	100	100	100	100
		Peningkatan Laporan kinerja yang efektif, efisien dan akuntabel	Persentase penyelesaian Manajemen Internal yang efektif, efisien dan akuntabel	%	100	100	100	100	100	100

Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kota Semarang lainnya adalah Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai alat evaluasi ketercapaian standar pelayanan minimal yang diberikan oleh Dinas Sosial sudah baik, karena standar pelayanan minimal Dinas Sosial merupakan agregat dari mutu pelayanan Dinas Sosial itu sendiri.

Tabel 2.2

Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Sosial Tahun 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian						Anggaran (Rp.)
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti	Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	100%	Setiap Tahun	1) Jumlah barang jasa dan Sumber Daya Manusia 2) Jumlah dan kualitas Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial dan atau Relawan Sosial	100%	Setiap Tahun	2.626.384
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti	Persentase (%) Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	100%	Setiap Tahun				
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Persentase (%) Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	100%	Setiap Tahun				
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti	Persentase (%) Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	100%	Setiap Tahun				
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	Persentase (%) Korban bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100%	Setiap Tahun	1) Jumlah dan kualitas barang dan jasa 2) Jumlah dan kualitas Tenaga Kesejahteraan Sosial dan atau Relawan Sosial	100%	Setiap Tahun	747.128

B. PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam rencana kerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Komitmen ini dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja.

Tujuan dan sasaran pembangunan menurut misi merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan wajib dan pilihan dalam mendukung pelaksanaan visi pembangunan daerah.

Adapun tujuan Jangka Menengah Dinas Sosial Kota Semarang adalah

1) Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat (Indikator tujuan : Persentase Penduduk Miskin).
2) Peningkatan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) (Indikator tujuan : Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani
3) Menghasilkan Laporan kinerja yang berkualitas (Indikator tujuan : Persentase penyelesaian Manajemen Internal dinas sosial yang efektif, efisien dan akuntabel)

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai secara berkesinambungan dan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam rangka mencapai hasil yang akan dicapai dari tujuan yang telah ditetapkan dimaksud, maka sasaran yang akan dicapai dalam rentang waktu lima tahun kedepan yaitu :

1) Menurunnya Angka Kemiskinan
   (Indikator : Persentase Penduduk Miskin yang dientaskan)
2) Terwujudnya Pemerataan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
   (Indikator : Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti, Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota, dan Persentase Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS))

3) Peningkatan Laporan kinerja yang efektif, efisien dan akuntabel (Indikator Kinerja : Persentase penyelesaian Manajemen Internal yang efektif, efisien dan akuntabel)

Tabel 2.3

Perencanaan Kinerja Dinas Sosial Kota Semarang

No	Tujuan	No.	Sasaran	No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat				Persentase Penduduk Miskin	%	16,10
		1.1	Menurunnya Angka Kemiskinan	1.1.1	Persentase Penduduk Miskin yang dientaskan	%	0,05
2.	Peningkatan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)				Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	%	100
		2.1	Terwujudnya Pemerataan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	2.1.1	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	%	99,75
				2.1.2	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100
				2.1.3	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100
				2.1.4	Cakupan Potensi dan Sumber Kesejahteraan (PSKS) yang difasilitasi	%	66,67
				2.1.5	Cakupan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yg memperoleh bantuan sosial	%	69,15
3.	Menghasilkan Laporan kinerja yang berkualitas				Persentase penyelesaian Manajemen Internal dinas sosial yang efektif, efisien dan akuntabel	%	100
		3.1	Peningkatan Laporan kinerja yang efektif, efisien dan akuntabel	3.1.1	Persentase penyelesaian Manajemen Internal yang efektif, efisien dan akuntabel	%	100

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Penetapan indikator kinerja pada tingkat program dan kegiatan merupakan prasyarat bagi pengukuran kinerja. Kriteria pengukuran yang dipakai adalah target kinerja yang ditetapkan. Target kinerja menunjukkan komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap program dan kegiatan yang dilakukan.

Indikator kinerja kegiatan terdiri atas indikator input dan output. Sedangkan indiaktor kinerja program diukur dengan indikator hasil (outcome) yang pada umumnya dikaitkan dengan capaian outcome kegiatan yang dianggap sebagai penggerak kinerja utama atau mempunyai kontribusi terbesar untuk pencapaian program.

Indikator kinerja input terdiri atas besarnya dana yang digunakan dan pemakaian sumber daya manusia (SDM). Indikator kinerja output berupa hasil yang diperoleh setelah kegiatan selesai dilaksanakan, indikator kinerja outcome merupakan hasil atau manfaat dari output

Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022 Dinas Sosial Kota Semarang dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2.4

Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Menurunnya Angka Kemiskinan	1. Menurunnya Angka DTKS	15,65%
2	Terwujudnya pemerataan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	2. Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	99,75%
		3. Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%
		4. Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100%
		5. Cakupan Potensi dan Sumber Kesejahteraan (PSKS) yang difasilitasi	66,67%
		6. Cakupan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan sosial	69,15%
3	Peningkatan Laporan kinerja yang efektif, efisien dan akuntabel	7. Persentase penyelesaian Manajemen Internal yang efektif, efisien dan akuntabel	71,41%

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Sosial Kota Semarang tahun 2022 mempunyai 6 (enam) program yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan guna mencapai target yang telah ditetapkan. Program yang dirumuskan di sini merupakan bentuk upaya yang akan dilakukan dalam rangka merespon berbagai masalah yang ada dengan berorientasi pada visi dan misi sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepada Dinas Sosial Kota Semarang.

Perumusan program utama ini sekaligus merupakan implementasi perencanaan strategik yang mencakup program-program dan kegiatan yang dilakukan dalam jangka pendek (satu tahun) yaitu tahun 2022.

Beberapa program yang ditetapkan oleh Dinas Sosial Kota Semarang adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
   Dengan pagu anggaran Rp. 9.827.390.153,00. Program ini diarahkan pada (a) Peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu. (b) Meningkatkan kualitas kegiatan administrasi keuangan dan pengelolaan aset perangkat daerah. (c) Peningkatan kualitas kinerja dan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah
2. Program Pemberdayaan Sosial.
   Dengan pagu anggaran Rp. 7.653.900.777,00. Program ini diarahkan pada Fasilitasi dan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang ada, bertujuan untuk mendukung penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
3. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
   Dengan pagu anggaran Rp. 17.701.968,00. Program ini diarahkan pada Penanganan kepada Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan untuk mendapatkan perlindungan sosial.
4. Program Rehabilitasi Sosial
   Dengan pagu anggaran Rp. 12.642.555.412,00. Program ini diarahkan pada Penanganan kepada Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA untuk mendapatkan rehabilitasi sosial.

5. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

   Dengan pagu anggaran Rp. 5.274.938.128,00. Program ini diarahkan pada Penanganan kepada Fakir Miskin untuk mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan Anak-anak terlantar untuk mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial.

6. Program Penanganan Bencana

   Dengan pagu anggaran Rp. 907.882.758,00. Program ini diarahkan pada Penanganan kepada korban bencana alam dan bencana sosial di Kota Semarang yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Untuk mengetahui seberapa besar penyelesaian permasalahan utama atau isu strategis pembangunan yang tercantum dalam dokumen perencanaan jangka menengah (RENSTRA) dan dokumen Rencana Kerja (RENJA) tahun 2022, maka dilakukan pengukuran terhadap target kinerja sebagaimana telah diperjanjikan pada dokumen Perjanjian Kinerja yang telah disetujui atau ditandatangani pada awal tahun 2022. Pada BAB III ini akan dilakukan pengukuran terhadap capaian Indikator Kinerja Utama sebagai gambaran kinerja organisasi dan indikator kinerja sasaran dan target yang telah ditentukan ditahun 2022.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas kinerja Dinas Sosial merupakan perwujudan kewajiban Dinas Sosial Kota Semarang untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2021 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target pada Dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin) melalui media berupa formulir Pengukuran Kinerja. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi SKPD.

Pengukuran kinerja mencakup 2 (dua) aspek, yaitu :

1. Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) SKPD yang merupakan tingkat pencapaian sasaran dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan.
2. Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan.

Rumus untuk mencari Presentase dalam Pengukuran Kinerja :

1. Untuk mengukur semakin tinggi realisasi, menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik

$$\text{Presentase Tingkat Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Untuk mengukur semakin tinggi realisasi, menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja

$$\text{Presentase Tingkat Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Untuk melihat keberhasilan program dan kegiatan dilakukan pengukuran keberhasilan setiap indikator. Perhitungan tingkat capaian dilakukan menggunakan membandingkan antara target dan realisasi. Keberhasilan pencapaian sasaran program digolongkan menjadi 4 (empat) skala pengukuran, dengan kategori sebagai berikut :

a. Lebih dari 100 % = Sangat Baik (A)
b. 76% sampai 100% = Baik (B)
c. 56% sampai 75 % = Cukup (C)
d. Kurang dari 55 % = Kurang (K)

Pada tahun anggaran 2022, Dinas Sosial Kota Semarang telah melaksanakan berbagai program/kegiatan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Organisasi Dinas Sosial Kota Semarang memiliki 3 Tujuan yaitu **Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat** (Indikator : Angka Kemiskinan) dengan sasaran Menurunnya Angka Kemiskinan (Indikator : Menurunnya Angka DTKS (berdasarkan kelayakan penerima Bansos BPNT dan PKH)), Tujuan **Peningkatan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)** (Indikator : Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani) dengan sasaran Terwujudnya Pemerataan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) (dengan 5 indikator), dan Tujuan **Menghasilkan Laporan kinerja yang berkualitas** (Indikator : Persentase penyelesaian Manajemen Internal dinas sosial yang efektif, efisien dan akuntabel) dengan sasaran Peningkatan Laporan kinerja yang efektif,

efisien dan akuntabel (indikator : Persentase penyelesaian Manajemen Internal yang efektif, efisien dan akuntabel), dengan realisasi sebagai berikut :

B.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Tabel 3.1

Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

No.	Tujuan/Sasaran	No.	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat		Angka Kemiskinan	4,32	4,25	101,62	Sangat Baik
1.1	Menurunnya Angka Kemiskinan	1.1.1	Menurunnya Angka DTKS (berdasarkan kelayakan penerima Bansos BPNT dan PKH)	16,10	11,06	131,3	Sangat Baik
2.	Peningkatan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	99,75	100	100,25	Sangat Baik
2.1	Terwujudnya Pemerataan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	2.1.1	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	99,75	100	100,25	Sangat Baik
		2.1.2	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100	100	100	Baik
		2.1.3	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100	100	100	Baik
		2.1.4	Cakupan Potensi dan Sumber Kesejahteraan (PSKS) yang difasilitasi	66,67	100	150	Sangat Baik
		2.1.5	Cakupan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yg memperoleh bantuan sosial	69,15	80,34	116,18	Sangat Baik
3.	Menghasilkan Laporan kinerja yang berkualitas		Persentase penyelesaian Manajemen Internal dinas sosial yang efektif, efisien dan akuntabel	100	100	100	Baik
3.1	Peningkatan Laporan kinerja yang efektif, efisien dan akuntabel	3.1.1	Persentase penyelesaian Manajemen Internal yang efektif, efisien dan akuntabel	100	100	100	Baik

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada tahun ini dapat dilihat di tabel 3.1 dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Pada Tujuan 1 *Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat* dengan indikator kinerja *Angka Kemiskinan* terealisasi sebesar 4,25% dari target 4,32% dengan tingkat capaian sebesar 101,62% berdasarkan skala capaian kinerja masuk kategori **"SANGAT BAIK"**. Untuk tujuan 1 Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat dengan indikator Angka Kemiskinan, angka ini didapat dari hasil data yang dikeluarkan oleh BPS.

b. Pada Sasaran 1.1 *Menurunnya Angka Kemiskinan* dengan indikator kinerja 1.1.1 *Menurunnya Angka DTKS* terealisasi sebesar 11,06% dari target 16,10% dengan tingkat capaian sebesar 131,3% berdasarkan skala capaian kinerja masuk kategori **"SANGAT BAIK"**.

   (Untuk Tujuan 1 dan Sasaran 1.1 menggunakan RUMUS PENGUKURAN KINERJA : **Semakin tinggi realisasi, menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja).**

c. Pada Tujuan 2 *Peningkatan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)* dengan indikator kinerja *Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani* terealisasi sebesar 100% dari target 99,75% dengan tingkat capaian sebesar 100,25% berdasarkan skala capaian kinerja masuk kategori **"SANGAT BAIK"**.

d. Pada Sasaran 2.1 *Terwujudnya Pemerataan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)* dengan indikator kinerja 2.1.1 *Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani* terealisasi sebesar 100% dari target 99,75% dengan tingkat capaian sebesar 100,25% berdasarkan skala capaian kinerja masuk kategori **"SANGAT BAIK".**

e. Pada Sasaran 2.1 *Terwujudnya Pemerataan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)* dengan indikator kinerja 2.1.2 *Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti* terealisasi sebesar 100% dari target 100% dengan tingkat capaian sebesar 100% berdasarkan skala capaian kinerja masuk kategori **"BAIK".**

f. Pada Sasaran 2.1 *Terwujudnya Pemerataan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)* dengan indikator kinerja 2.1.3 *Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota* terealisasi sebesar 100% dari target 100% dengan tingkat

capaian sebesar 100% berdasarkan skala capaian kinerja masuk kategori **"BAIK".**

g. Pada Sasaran 2.1 *Terwujudnya Pemerataan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)* dengan indikator kinerja 2.1.4 *Cakupan Potensi dan Sumber Kesejahteraan (PSKS) yang difasilitasi* terealisasi sebesar 66,67% dari target 100% dengan tingkat capaian sebesar 150% berdasarkan skala capaian kinerja masuk kategori **"SANGAT BAIK".**

h. Pada Sasaran 2.1 *Terwujudnya Pemerataan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)* dengan indikator kinerja 2.1.5 *Cakupan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yg memperoleh bantuan sosial* terealisasi sebesar 80,34% dari target 69,15% dengan tingkat capaian sebesar 116,18% berdasarkan skala capaian kinerja masuk kategori **"SANGAT BAIK".**

i. Pada Tujuan 3 *Menghasilkan Laporan kinerja yang berkualitas* dengan indikator kinerja *Persentase penyelesaian Manajemen Internal dinas sosial yang efektif, efisien dan akuntabel* terealisasi sebesar 100% dari target 100% dengan tingkat capaian sebesar 100% berdasarkan skala capaian kinerja masuk kategori **"BAIK"**.

j. Pada Sasaran 3.1 *Peningkatan Laporan kinerja yang efektif, efisien dan akuntabel* dengan indikator kinerja 3.1.1 *Persentase penyelesaian Manajemen Internal yang efektif, efisien dan akuntabel* terealisasi sebesar 100% dari target 100% dengan tingkat capaian sebesar 100% berdasarkan skala capaian kinerja masuk kategori **"BAIK".**

B.2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka hasil capaian kinerja akan terlihat seperti tabel dibawah ini :

Tabel 3.2

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya

Sasaran	Indikator Kinerja	2020			2021			2022		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Menurunnya Angka kemiskinan	Menurunnya Angka DTKS (berdasarkan kelayakan penerima Bansos BPNT dan PKH)	17,32%	16,15%	106,76%	16,45%	24,23%	52,71%	16,10%	11,06%	131,3%
Terwujudnya Pemerataan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	97%	99,69%	102,77%	98%	100%	102,04%	99,75%	100%	100,25%
	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	-	-	-	-	-	-	100%	100%	100%
	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	-	-	-	-	-	-	100%	100%	100%
	Cakupan Potensi dan Sumber Kesejahteraan (PSKS) yang difasilitasi	91,60%	66,67%	72,78%	91,60%	71,42%	77,97%	66,67%	100%	150%
	Cakupan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan sosial	16.000 orang	513.287 orang	3.208%	16.200 orang	168.505 orang	1.040,15%	69,15%	80,34%	116,18%
Peningkatan Laporan kinerja yang efektif, efisien dan akuntabel	Persentase penyelesaian Manajemen Internal yang efektif, efisien dan akuntabel	-	-	-	-	-	-	100%	100%	100%

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat dari tabel 3.2 dengan penjelasan sebagai berikut;

Pada sasaran pertama **Menurunnya Angka Kemiskinan** realisasi tahun 2021 dibandingkan tahun 2020 mengalami penurunan, hal ini dikarenakan adanya kebijakan dari Kementerian/Lembaga terkait tentang angka DTKS pada tahun 2021, penentuan angka DTKS Tahun 2021 adalah angka kesejahteraan sosial yang meliputi :

a. 6 metode pemutakhiran data kemiskinan :
   1) Usulan daerah
   2) Fitur usul sanggah aplikasi cek bansos
   3) Data bencana
   4) Hasil pengecekan lapangan berdasarkan berita media
   5) Hasil verifikasi pejuang muda
   6) Hasil geo tagging data spasial dari citra satelit
b. Bantuan dari Kementerian/ Lembaga lain.

Sehingga penetapan angka kemiskinan yang merujuk dari data penerima manfaat bansos bersumber dari kemensos yang ada di DTKS. Pada Tahun 2020 angka kemiskinan sebanyak 271.396 atau 16,15% Sedangkan untuk angka kemiskinan Tahun 2021 sebanyak 407.363 jiwa atau 24,23%.

Dan pada tahun 2022 realisasi mengalami kenaikan kembali dikarenakan hasil verifikasi validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk warga miskin Kota Semarang pada Tahun 2022 berdasarkan kelayakan penerima Bansos BPNT dan PKH.

Pada sasaran kedua **Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)** dengan 5 indikator kinerja, realisasi yang dicapai untuk 4 indikator tidak mengalami kenaikan dan penurunan yang berarti, sedangkan pada indikator yang kelima "Cakupan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan sosial" pada tahun 2020 dan tahun 2021 formula perhitungan menggunakan satuan "orang", untuk realisasi pemberian bantuan sosial untuk PMKS pada tahun 2020 lebih tinggi dibandingkan tahun 2021 dan tahun 2022, hal ini dikarenakan adanya Pandemi Covid-19 sehingga memicu meningkatnya jumlah PMKS pada Tahun 2020. Sedangkan pada sasaran ketiga **Peningkatan Laporan kinerja yang efektif, efisien dan akuntabel** pada tahun 2022 realisasi yang dicapai sesuai dengan target yang ditetapkan.

B.3. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target akhir RPJMD dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 3.3

Perbandingan realisasi kinerja dengan target akhir RPJMD

No.	Tujuan/Sasaran	No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Capaian 2022	Target Akhir 2026	Capaian (%)	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat		Angka Kemiskinan	4,25	101,62	4,15	97,6	Akan Tercapai
1.1	Menurunnya Angka kemiskinan	1.1.1	Menurunnya Angka DTKS (berdasarkan kelayakan penerima Bansos BPNT dan PKH)	11,06	131,3	14,90	125,77	Tercapai
2.	Peningkatan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	100	100,25	100	100	Tercapai
2.1	Terwujudnya Pemerataan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	2.1.1	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	100	100,25	100	100	Tercapai
		2.1.2	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100	100	100	100	Tercapai
		2.1.3	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100	100	100	100	Tercapai
		2.1.4	Cakupan Potensi dan Sumber Kesejahteraan (PSKS) yang difasilitasi	100	150	100	100	Tercapai
		2.1.5	Cakupan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yg memperoleh bantuan sosial	80,34	116,18	71,96	111,65	Tercapai
3.	Menghasilkan Laporan kinerja yang berkualitas		Persentase penyelesaian Manajemen Internal dinas sosial yang efektif, efisien dan akuntabel	100	100	100	100	Tercapai
3.1	Peningkatan Laporan kinerja yang efektif, efisien dan akuntabel	3.1.1	Persentase penyelesaian Manajemen Internal yang efektif, efisien dan akuntabel	100	100	100	100	Tercapai

Dari tabel diatas dapat dilihat pada indikator **Angka Kemiskinan** dengan tujuan **Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat** untuk tahun berikutnya masih perlu dikaji ulang dan dikejar kekurangan-kekurangannya agar pada target akhir tahun 2026 realisasi yang dicapai dapat sesuai target atau melebihi target akhir RPJMD.

Sedangkan pada indikator lainnya menunjukkan capaian pelayanan Dinas Sosial Kota Semarang sudah sesuai dan melebihi target akhir RPJMD.

B.4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Pada tujuan dan sasaran Dinas Sosial Kota Semarang tidak terdapat angka standar nasional sehingga tidak ada perbandingan realisasi kinerja tahunan dengan angka standar nasional.

B.5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Dalam melaksanakan program dan kegiatan tidak lepas dari beberapa faktor yang menjadi penghambat ketercapaian kinerja Dinas Sosial Kota Semarang, antara lain :

1) Penetapan sasaran penerima layanan dasar Tahun 2022 belum berdasarkan pendataan tetapi masih menggunakan estimasi berdasarkan pelayanan yang dilaksanakan dinas tahun sebelumnya.
2) Belum/kurang pahamnya sumber daya manusia pada bidang pengampu kegiatan pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal bidang sosial.
3) Kurangnya kompetensi SDM dibidang pengawasan teknologi informasi. Hal ini diperlukan dalam rangka melakukan digitalisasi dokumen-dokumen sehingga meminimalisir kerusakan atau kehilangan dokumen fisik.
4) Keterbatasan sarana penunjang pelaksanaan pelayanan publik.
5) Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai prosedur pelayanan public.

Meskipun dengan adanya faktor-faktor penghambat kinerja juga terdapat faktor pendorong, yaitu :

1) Sudah adanya uji kompetensi sertifikasi SDM Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berperan dalam penanganan PPKS.
2) Adanya rumah singgah/UPTD/shelter yang dimiliki Dinas Sosial Kota Semarang untuk menampung penerima layanan dasar yang terjaring tim penjangkauan Dinas Sosial.

Adapun alternative solusi yang dapat dilakukan adalah antara lain :

1) Penerima layanan dasar diberikan kepada kelayan yang ditangani di UPTD/Shelter hasil laporan dari call center 112 Kota Semarang, laporan dari warga secara langsung ke Dinas Sosial dan data yang diperoleh pada pendataan bulan Juni 2022.
2) Adanya dukungan OPD kepada SDM pengampu agar lebih memahami kegiatan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial dengan diikutkan dalam segala kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis yang dilaksanakan OPD teknis terkait.
3) Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan publik.
4) Sosialisasi mengenai prosedur pelayanan kepada masyarakat.

B.6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.4

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	4,32	4,25	101,62	1.300.001.620	1.035.976.556	79,69	21,93
1.1	Menurunnya Angka kemiskinan	16,10	11,06	131,3				
2.	Peningkatan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	99,75	100	100,25	25.341.036.023	23.296.655.320	91,93	8,32
2.1	Terwujudnya Pemerataan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	99,75	100	100,25				
3.	Menghasilkan Laporan kinerja yang berkualitas	100	100	100	9.635.440.250	7.862.729.860	81,60	18,40
3.1	Peningkatan Laporan kinerja yang efektif, efisien dan akuntabel	100	100	100				

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dapat kita lihat dari tabel 3.4 dengan penjelasan sebagai berikut :

Pada Tujuan 1 dan Sasaran 1.1 didukung dengan 1 (satu) program yaitu **Program** Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan 1 (satu) kegiatan yaitu **Kegiatan** Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota dan dengan 2 (dua) Sub Kegiatan yaitu Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota dan Sub kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran total sebesar Rp. 1.300.001.620,00 dan realisasi sebesar Rp. 1.035.976.556,00 dengan capaian keuangan sebesar 79,69% dan didapat efisiensi sebesar 21,93%.

Pada Tujuan 2 dan Sasaran 2.1 didukung dengan 5 (lima) program yaitu **Program** Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dengan 1 (satu) kegiatan yaitu **Kegiatan** Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal dengan 1 (satu) Sub kegiatan yaitu Sub Kegiatan Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal, **Program** Rehabilitasi Sosial dengan 2 (dua) kegiatan yaitu **Kegiatan** Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial dengan 12 (dua belas) sub kegiatan (terlampir), **Kegiatan** Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial dengan 14 (empat belas) sub kegiatan (terlampir). **Program** Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan 2 (dua) kegiatan yaitu **Kegiatan** Pemeliharaan Anak-anak Terlantar dengan 3 (tiga) sub kegiatan yaitu Sub Kegiatan Penjangkauan Anak-Anak Terlantar, Sub Kegiatan Rujukan Anak-Anak Terlantar, dan Sub Kegiatan Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar, **Kegiatan** Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota dengan 2 (dua) sub Kegiatan yaitu Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga dan Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat. **Program** Penanganan Bencana dengan 2 (dua) kegiatan yaitu **Kegiatan** Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota dengan 5 (lima) sub kegiatan yaitu Sub kegiatan Penyediaan Makanan, Sub kegiatan Penyediaan Sandang, Sub Kegiatan Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi, Sub Kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan, dan Sub Kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial. **Kegiatan** Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan

Bencana Kabupaten/Kota dengan 2 (dua) Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana, dan Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana. **Program** Pemberdayaan Sosial dengan 1 (satu) kegiatan yaitu **Kegiatan** Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota dengan 5 (lima) sub kegiatan yaitu Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota, dan Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) dengan anggaran total sebesar Rp. 25.341.036.023,00 dan realisasi sebesar Rp. 23.296.655.320,00 dengan capaian keuangan sebesar 91,93% dan didapat efisiensi sebesar 8,32%.

Pada Tujuan 3 dan sasaran 3.1 didukung dengan 1 (satu) program yaitu **Program** Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan 3 (tiga) kegiatan yaitu **Kegiatan** Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan 7 (tujuh) sub kegiatan (terlampir). **Kegiatan** Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan 6 (enam) sub kegiatan (terlampir). **Kegiatan** Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan 9 (Sembilan) sub kegiatan (terlampir) dengan anggaran total sebesar Rp. 9.635.440.250,00 dan realisasi sebesar Rp. 7.862.729.860,00 dengan capaian keuangan sebesar 81,60% dan didapat efisiensi sebesar 18,40%.

B.7. Analisis Program/Kegiatan Tahun 2022 yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Tabel 3.5

Analisis Program/Kegiatan Tahun 2022 yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Angka Kemiskinan	101,62				
1.1	Menurunnya Angka kemiskinan	Menurunnya Angka DTKS (berdasarkan kelayakan penerima Bansos BPNT dan PKH)	131,3				
				Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	**Cakupan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan Sosial**	**100**	**Menunjang**
				Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Menurunnya angka DTKS	100	
2.	Peningkatan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	100,25				
2.1	Terwujudnya Pemerataan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	100,25				
				Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	**Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Pekerja Migran Bermasalah Sosial yang ditangani**	**100**	**Menunjang**
				Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang ditangani	100	

				Program Rehabilitasi Sosial	**Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani**	**100**	**Menunjang**
				Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100	
				Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang direhabilitasi sosial di luar Panti Sosial	100	
				Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	**Cakupan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan Sosial**	**100**	**Menunjang**
				Kegiatan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Pemberian perlindungan jaminan sosial kepada anak-anak terlantar	100	
				Program Penanganan Bencana	**Persentase Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS) korban bencana yang ditangani**	**100**	**Menunjang**
				Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase (%) Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100	
		Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100				

				Program Rehabilitasi Sosial	**Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani**	**100**	**Menunjang**
				Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100	
		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100				
				Program Penanganan Bencana	**Persentase Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS) korban bencana yang ditangani**	**100**	**Menunjang**
				Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase (%) Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100	
				Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kota	100	
		Cakupan Potensi dan Sumber Kesejahteraan (PSKS) yang difasilitasi	150				
				Program Pemberdayaan Sosial	**Cakupan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang difasilitasi**	**100**	**Menunjang**
				Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terfasilitasi	100	

		Cakupan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan sosial	116,18				
				Program Rehabilitasi Sosial	**Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani**	**100**	**Menunjang**
				Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang direhabilitasi sosial di luar Panti Sosial	100	
				Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	**Cakupan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan Sosial**	**100**	**Menunjang**
				Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Menurunnya angka DTKS	100	
				Program Penanganan Bencana	**Persentase Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS) korban bencana yang ditangani**	**100**	**Menunjang**
				Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase (%) Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100	
3.	Menghasilkan Laporan kinerja yang berkualitas	Persentase penyelesaian Manajemen Internal dinas sosial yang efektif, efisien dan akuntabel	100				
3.1	Peningkatan Laporan kinerja yang efektif, efisien dan akuntabel	Persentase penyelesaian Manajemen Internal yang efektif, efisien dan akuntabel	100				

				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja Dinas Sosial**	**100**	**Menunjang**
					Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Sosial		
					Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Dinas Sosial		
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD	100	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi keuangan SKPD	100	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya kebutuhan rumah tangga SKPD	100	

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa semua program dan kegiatan berhasil menunjang kinerja Dinas Sosial Kota Semarang.

Untuk tujuan **Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat** dengan sasaran **Menurunnya Angka Kemiskinan** dengan indikator kinerja sasaran **Menurunnya Angka DTKS** ditunjang 1 (satu) program yaitu Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota dengan tingkat capaian 100% yang didalamnya didukung sub kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota (100%) dan sub kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota (100%).

Untuk tujuan **Peningkatan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)** dengan sasaran **Terwujudnya Pemerataan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)** dengan indikator kinerja sasaran **Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani** ditunjang dengan 4 (empat) program yaitu Program pertama Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dengan kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal dengan tingkat capaian 100% yang didalamnya didukung sub kegiatan Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak

Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal (100%), Program kedua Rehabilitasi Sosial dan kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial dengan tingkat capaian 100% yang didalamnya didukung 12 sub kegiatan yang semuanya tercapai 100%, dan kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial dengan tingkat capaian 100% yang didalamnya didukung 14 sub kegiatan yang semuanya tercapai 100%, Program ketiga Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan kegiatan Pemeliharaan Anak-anak Terlantar dengan tingkat capaian 100% yang didalamnya didukung sub kegiatan Penjangkauan Anak-Anak Terlantar (100%), sub kegiatan Rujukan Anak-Anak Terlantar (100%) dan sub kegiatan Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar (100%), Program keempat Penanganan Bencana dengan kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota dengan tingkat capaian 100% yang didalamnya didukung sub kegiatan Penyediaan Makanan (100%), sub kegiatan Penyediaan Sandang (100%), sub kegiatan Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi (100%), sub kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan (100%), dan sub kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial (100%).

Indikator kinerja sasaran **Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti** ditunjang 1 (satu) program yaitu Rehabilitasi Sosial dan kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial dengan tingkat capaian 100% yang didalamnya didukung 12 sub kegiatan dengan capaian 100%.

Indikator kinerja sasaran **Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota** ditunjang 1 (satu) program yaitu Penanganan Bencana dengan kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota dengan tingkat capaian 100% yang didalamnya didukung sub kegiatan Penyediaan Makanan (100%), sub kegiatan Penyediaan Sandang (100%), sub kegiatan Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi (100%), sub kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan (100%), dan sub kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial (100%), dan kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota dengan tingkat capaian 100% yang didalamnya didukung sub kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan

Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana (100%) dan sub kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana (100%).

Indikator kinerja sasaran **Cakupan Potensi dan Sumber Kesejahteraan (PSKS) yang difasilitasi** ditunjang 1 (satu) program yaitu Pemberdayaan Sosial dengan kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota dengan tingkat capaian 100% yang didalamnya didukung sub kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (100%), sub kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota (100%), sub kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (100%), sub kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (100%), dan sub kegiatan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) (100%).

Indikator kinerja sasaran **Cakupan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan sosial** ditunjang dengan 3 (tiga) program yaitu Program pertama Rehabilitasi Sosial dengan kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial dengan tingkat capaian 100% yang didalamnya didukung 14 sub kegiatan yang semuanya tercapai100%, Program kedua Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota dengan tingkat capaian 100% yang didalamnya didukung sub kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga (100%), dan sub kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat (100%), dan Program ketiga Penanganan Bencana dengan kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota dengan tingkat capaian 100% yang didalamnya didukung sub kegiatan Penyediaan Makanan (100%), sub kegiatan Penyediaan Sandang (100%), sub kegiatan Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi (100%), sub kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan (100%), dan sub kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial (100%).

Untuk tujuan **Menghasilkan Laporan kinerja yang berkualitas** dengan sasaran **Peningkatan Laporan kinerja yang efektif, efisien dan akuntabel** dengan indikator kinerja sasaran **Persentase penyelesaian Manajemen Internal yang efektif, efisien dan akuntabel** ditunjang 1 (satu) program yaitu Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan tingkat capaian

100% yang didalamnya didukung 7 (tujuh) sub kegiatan yang semuanya tercapai 100%, kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan tingkat capaian 100% yang didalamnya didukung 6 (enam) sub kegiatan yang semuanya tercapai 100%, dan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan tingkat capain 100% yang didalamnya didukung 9 (sembilan) sub kegiatan yang semuanya tercapai 100%.

C. REALISASI ANGGARAN

Penggunaan atau realisasi anggaran berdasarkan program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6

Realisasi Anggaran Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2022

(NAMA OPD)	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN (%)
URUSAN WAJIB SOSIAL	**36.324.369.196**	**33.838.994.404**	**93,16**
DINAS SOSIAL	**36.324.369.196**	**33.838.994.404**	**93,16**
JUMLAH	**36.324.369.196**	**33.838.994.404**	**93,16**

Tabel 3.7

Rincian Realisasi Anggaran Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2022

KODE REK	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN (%)
	Urusan Wajib Sosial	**36.324.369.196**	**33.838.994.404**	**93,16**
	OPD : Dinas Sosial	**36.324.369.196**	**33.838.994.404**	**93,16**
06.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**9.827.390.153**	**9.446.751.328**	**96,13**
2.01	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**19.151.000**	**18.580.500**	**97,02**
01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.001.000	1.001.000	100
01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	7.200.000	7.200.000	100
01.03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	7.200.000	6.630.000	92,08
01.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	1.000.000	1.000.000	100
01.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	1.000.000	1.000.000	100
01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	750.000	750.000	100
01.07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.000.000	999.500	99,95
2.02	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**7.234.574.275**	**7.120.724.072**	**98,43**
02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.890.204.275	6.802.797.672	98,73
02.02	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	340.620.000	314.370.000	92,29

KODE REK	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN (%)
	Urusan Wajib Sosial	**36.324.369.196**	**33.838.994.404**	**93,16**
	OPD : Dinas Sosial	**36.324.369.196**	**33.838.994.404**	**93,16**
02.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1.000.000	975.000	97,50
02.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.000.000	852.750	85,28
02.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.000.000	990.150	99,02
02.08	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	750.000	738.500	98,47
2.06	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**777.688.220**	**723.425.288**	**93,02**
06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.066.080	3.696.750	90,92
06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	279.471.070	248.138.900	88,79
06.03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	19.501.760	18.042.221	92,52
06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	28.275.123	22.990.449	81,31
06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.636.202	20.525.450	99,46
06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.400.000	5.400.000	100
06.08	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	62.500.000	62.269.900	99,63
06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	133.565.382	123.971.627	92,82
06.11	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	224.272.603	218.389.991	97,38
2.07	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**502.779.936**	**465.822.280**	**92,65**
07.05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	108.427.948	98.292.400	90,65
07.10	Sub Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	394.351.991	367.529.880	93,20
2.08	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**115.697.665**	**104.217.908**	**90,08**
08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	115.697.665	104.217.908	90,08
2.09	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.135.745.857**	**978.224.480**	**86,13**
09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.949.998	28.110.900	70,37
09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan perikinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	730.540.720	603.589.230	82,62
09.05	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	7.999.200	7.980.000	99,76
09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan atau rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	219.094.500	214.918.000	98,09
09.10	Sub Kegiatan Pemeliharaan atau Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	60.460.518	46.106.000	76,26
09.11	Sub Kegiatan Pemeliharaan atau Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pedukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	77.700.921	77.520.350	99,77
2.13	**Kegiatan Penataan Organisasi**	**41.753.200**	**35.756.800**	**85,64**
13.01	Sub Kegiatan Pengelolaaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	41.753.200	35.756.800	85,64
06.02	**Program Pemberdayaan Sosial**	**7.653.900.777**	**7.240.150.944**	**94,59**
2.02	**Kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**69.756.900**	**59.611.200**	**85,46**
02.01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	69.756.900	59.611.200	85,46

KODE REK	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN (%)
	Urusan Wajib Sosial	**36.324.369.196**	**33.838.994.404**	**93,16**
	OPD : Dinas Sosial	**36.324.369.196**	**33.838.994.404**	**93,16**
2.03	**Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	**7.584.143.877**	**7.180.539.744**	**94,68**
03.01	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	5.255.644.098	5.164.170.920	98,26
03.02	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	725.892.798	719.221.900	99,08
03.03	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	174.355.962	148.131.900	84,96
03.04	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	467.429.198	420.333.781	89,92
03.05	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	960.821.821	728.681.243	85,46
06.03	**Program Penanganan Warga Migran Korban Tindak Kekerasan**	**17.701.968**	**13.387.399**	**75,63**
2.01	**Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal**	**17.701.968**	**13.387.399**	**75,63**
01.01	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	17.701.968	13.387.399	75,63
06.04	**Program Rehabilitasi Sosial**	**12.642.555.412**	**12.367.689.026**	**97,83**
2.01	**Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	**2.626.384.310**	**2.536.557.200**	**96,58**
01.01	Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	1.096.125.000	1.094.940.000	99,89
01.02	Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	59.206.720	58.752.600	99,23
01.03	Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu	11.037.320	5.867.900	53,16
01.04	Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	2.100.000	2.100.000	100
01.05	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	726.074.810	713.967.100	98,33
01.06	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	39.150.000	37.750.000	96,42
01.07	Sub Kegiatan Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	1.330.000	1.330.000	100
01.08	Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	3.620.460	2.792.100	77,12
01.09	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	540.545.000	510.335.000	94,41
01.10	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan	86.370.000	53.240.000	61,64
01.11	Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	20.085.000	20.085.000	100
01.12	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan	40.740.000	35.397.500	86,89
2.02	**Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**	**10.016.171.102**	**9.831.131.826**	**98,15**
02.01	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	538.297.600	525.359.070	97,60
02.02	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan	1.900.000	1.900.000	100

KODE REK	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN (%)
	Urusan Wajib Sosial	**36.324.369.196**	**33.838.994.404**	**93,16**
	OPD : Dinas Sosial	**36.324.369.196**	**33.838.994.404**	**93,16**
02.03	Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	8.701.061.099	8.580.985.156	98,62
02.04	Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	13.150.600	12.690.000	96,50
02.05	Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu	413.002.773	393.345.750	95,24
02.06	Sub Kegiatan Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	310.570	303.000	97,56
02.07	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	61.133.460	45.487.000	74,41
02.08	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	106.850.000	99.325.000	92,96
02.09	Sub Kegiatan Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak	1.900.000	1.900.000	100
02.10	Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	1.900.000	1.900.000	100
02.11	Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	2.090.000	2.090.000	100
02.12	Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	1.900.000	1.900.000	100
02.13	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan	2.950.000	2.950.000	100
02.14	Sub Kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	169.725.000	160.996.850	94,86
06.05	**Program Perlindungan dan Jaminan Sosial**	**5.274.938.128**	**3.922.163.107**	**74,35**
2.01	**Kegiatan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar**	**40.233.510**	**13.244.750**	**32,92**
01.01	Sub Kegiatan Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	12.636.930	4.717.000	37,33
01.02	Sub Kegiatan Rujukan Anak-Anak Terlantar	12.760.000	1.425.000	11,17
01.03	Sub Kegiatan Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	14.836.580	7.102.750	47,87
2.02	**Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**5.234.704.618**	**3.908.918.357**	**74,67**
02.01	Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	500.088.600	486.023.593	97,19
02.02	Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	586.097.520	549.952.963	93,83
02.03	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	4.034.935.318	2.766.190.841	68,56
02.04	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	113.583.180	106.750.960	93,98
06.06	**Program Penanganan Bencana**	**907.882.758**	**848.852.600**	**93,50**
2.01	**Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	**747.128.820**	**697.449.600**	**93,35**
01.01	Sub Kegiatan Penyediaan Makanan	425.150.200	421.492.400	99,14
01.02	Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	73.817.570	64.190.000	86,96
01.03	Sub Kegiatan Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	24.705.005	23.813.000	96,39
01.04	Sub Kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	79.347.000	51.293.600	64,64
01.05	Sub Kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial	144.109.045	136.660.600	94,83
2.02	**Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**	**160.753.938**	**151.403.000**	**94,18**
02.01	Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	92.590.720	85.495.000	92,34
02.02	Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	68.163.218	65.908.000	96,69

BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggarannya serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis, disamping juga merupakan alat kendali atau penilai kualitas kerja. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja pada Dinas Sosial Kota Semarang pada tahun 2022 didasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuw Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

A. KESIMPULAN UMUM

Evaluasi terhadap beberapa kegiatan dan indikator yang dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban kepada publik dan seluruh pemangku kepentingan terkait, disamping juga bertujuan untuk menilai pencapaian kinerja yang telah dibuat, telah dilakukan pengukuran evaluasi dengan beberapa simpulan sebgaia berikut :

1. Capaian sasaran strategis dalam indikator utama Dinas Sosial Kota Semarang tahun 2022 terdapat 3 (tiga) tujuan dengan capaian SANGAT BAIK, dengan rata-rata capaian sebesar 100,6%; 3 (tiga) sasaran dengan capaian SANGAT BAIK, dengan rata-rata capaian sebesar 113,96%, 6 (enam) program dengan capaian BAIK, dengan rata-rata capaian sebesar 100%, 16 (enam belas) kegiatan dengan capaian BAIK, dengan rata-rata capaian sebesar 100%.
2. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD, realisasi sasaran Menurunnya Angka Kemiskinan dengan indikator Menurunnya Angka DTKS (berdasarkan kelayakan penerima Bansos BPNT dan PKH) adalah sebesar 131,3%, sementara target akhir 2026 sebesar 4,15% sehingga capaian tahun 2022 sudah melampaui target akhir RPJMD. Sedangkan sasaran Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan

Kesejahteraan Sosial (PPKS) dengan indikator Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani capaiannya adalah 100,25%, sementara target akhir tahun 2026 sebesar 100% sehingga capaian tahun 2022 sudah melampaui target akhir RPJMD. Kemudian indikator Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti persentase capaiannya adalah 100% sedangkan target tahun 2026 adalah 100% sehingga capaian tahun 2022 sudah sesuai taget akhir RPJMD. Untuk indikator Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota nilai capaiannya adalah 100% dan target akhir tahun 2026 sebesar 100% sehingga capaian untuk tahun 2022 untuk indikator ini sudah mencapai target akhir RPJMD. Indikator Cakupan Potensi dan Sumber Kesejahteraan (PSKS) yang difasilitasi realisasi capaiannya 150% sedangkan capaian akhir tahun 2026 adalah 100% sehingga cakupan 2022 untuk indicator ini sudah melampaui target akhir RPJMD; dan untuk indikator Cakupan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan sosial capaiannya adalah 116,18% dengan target akhir tahun sebesar 71,96 sehingga capaian tahun 2022 sudah melampaui target akhir RPJMD. Dan untuk sasaran Peningkatan Laporan kinerja yang efektif, efisien dan akuntabel dengan indikator Persentase penyelesaian Manajemen Internal yang efektif, efisien dan akuntabel nilai capaiannya adalah sebesar 100% dengan target akhir tahun RPJMD adalah sebesar 100% sehingga capaian tahun 2022 ini sudah sesuai dengan target akhir RPJMD.

3. Persentase capaian kinerja keuangan untuk Dinas Sosial Kota Semarang adalah 93,16% dengan realisasi sebesar Rp. 33.838.994.404,00 dari target anggaran sebesar Rp. 36.324.369.196,00.

B. REKOMENDASI

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta meningkatkan kinerja Dinas Sosial Kota Semarang, upaya-upaya yang akan dilakukan antara lain sebagai berikut :

a. Mengoptimalkan verifikasi dan validasi data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
b. Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan publik untuk mendukung program dan kegiatan Dinas Sosial Kota Semarang.

c. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dengan banyak memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengembangkan diri dan meningkatkan keahlian dengan memberikan pelatihan baik inhouse training atau pelatihan dalam daerah maupun luar daerah.

d. Mengadakan sosialisasi mengenai prosedur pelayanan publik kepada masyarakat.

Sebagai akhir kata, kiranya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2022 ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi yang objektif bagi pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders) dalam menilai kinerja Dinas Sosial Kota Semarang serta memberikan masukan bagi peningkatan dan penguatan peran Dinas Sosial Kota Semarang untuk memenuhi tujuan Dinas Sosial yaitu Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat dan Peningkatan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

Semarang, Februari 2023

KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA SEMARANG

HEROE SOEKENDAR, S.Sos.

LAMPIRAN 1

PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN
TAHUN 2022

DINAS SOSIAL KOTA SEMARANG

NO.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET (%)	REALISASI (%)	PROSENTASE (%)	KETERANGAN
1.	Menurunnya angka kemiskinan	Menurunnya Angka DTKS	16,10	11,06	131,3	
Rata-rata capaian sasaran 1					**131,3**	
2.	Terwujudnya Pemerataan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	99,75	100	100,25	
		Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100	100	100	
		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100	100	100	
		Cakupan Potensi dan Sumber Kesejahteraan (PSKS) yang difasilitasi	66,67	100	150	
		Cakupan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yg memperoleh bantuan sosial	69,15	80,34	116,18	
Rata-rata capaian sasaran 2					**113,3**	
3.	Menghasilkan Laporan kinerja yang berkualitas	Persentase penyelesaian Manajemen Internal yang efektif, efisien dan akuntabel	100	100	100	
Rata-rata capaian sasaran 3					**100**	

LAMPIRAN 2

ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA
TAHUN 2022

DINAS SOSIAL KOTA SEMARANG

NO.	JENIS BELANJA	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	SELISIH (Rp.)	%
A	**Belanja Operasi dan Belanja Modal**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**9.827.390.153**	**9.446.751.328**	**380.638.825**	**96,13**
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**19.151.000**	**18.580.500**	**570.500**	**97,02**
		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.001.000	1.001.000	0	100
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7.200.000	7.200.000	0	100
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.200.000	6.630.000	570.000	92,08
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.000.000	1.000.000	0	100
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.000.000	1.000.000	0	100
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	750.000	750.000	0	100
		Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.000.000	999.500	500	99,95
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**7.234.574.275**	**7.120.724.072**	**113.850.203**	**98,43**
		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.890.204.275	6.802.797.672	87.406.603	98,73
		Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	340.620.000	314.370.000	26.250.000	92,29
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1.000.000	975.000	25.000	97,50

NO.	JENIS BELANJA	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	SELISIH (Rp.)	%
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.000.000	852.750	147.250	85,28
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.000.000	990.150	9.850	99,02
		Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	750.000	738.500	11.500	98,47
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**777.688.220**	**723.425.288**	**54.262.932**	**93,02**
		Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.066.080	3.696.750	369.330	90,92
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	279.471.070	248.138.900	31.332.170	88,79
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	19.501.760	18.042.221	1.459.539	92,52
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	28.275.123	22.990.449	5.284.674	81,31
		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.636.202	20.525.450	110.752	99,46
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.400.000	5.400.000	0	100
		Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	62.500.000	62.269.900	230.100	99,63
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	133.565.382	123.971.627	9.593.755	92,82
		Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	224.272.603	218.389.991	5.882.612	97,38

NO.	JENIS BELANJA	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	SELISIH (Rp.)	%
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**502.779.936**	**465.822.280**	**36.957.656**	**92,65**
		Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	108.427.945	98.292.400	10.135.545	90,65
		Sub Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	394.351.991	367.529.880	26.822.111	93,20
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**115.697.665**	**104.217.908**	**11.479.757**	**90,08**
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	115.697.665	104.217.908	11.479.757	90,08
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**1.135.745.857**	**978.224.480**	**157.521.377**	**86,13**
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.949.998	28.110.900	11.839.098	70,37
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan perikinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	730.540.720	603.589.230	126.951.490	82,62
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	7.999.200	7.980.000	19.200	99,76
		Sub Kegiatan Pemeliharaan atau rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	219.094.500	214.918.000	4.176.500	98,09
		Sub Kegiatan Pemeliharaan atau Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	60.460.518	46.106.000	14.354.518	76,26
		Sub Kegiatan Pemeliharaan atau Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pedukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	77.700.921	77.520.350	180.571	99,77

NO.	JENIS BELANJA	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	SELISIH (Rp.)	%
		Kegiatan Penataan Organisasi	**41.753.200**	**35.756.800**	**5.996.400**	**92,65**
		Sub Kegiatan Pengelolaaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	41.753.200	35.756.800	5.996.400	90,65
		Program Pemberdayaan Sosial	**7.653.900.777**	**7.240.150.944**	**413.749.833**	**94,59**
		Kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	**69.756.900**	**59.611.200**	**10.145.700**	**85,46**
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	69.756.900	59.611.200	10.145.700	85,46
		Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	**7.584.143.877**	**7.180.539.744**	**403.604.133**	**94,68**
		Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	5.255.644.098	5.164.170.920	91.473.178	98,26
		Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	725.892.798	719.221.900	6.670.898	99,08
		Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	174.355.962	148.131.900	26.224.062	84,96
		Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	467.429.198	420.333.781	47.095.417	89,92
		Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	960.821.821	728.681.243	232.140.578	75,84

NO.	JENIS BELANJA	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	SELISIH (Rp.)	%
		Program Penanganan Warga Migran Korban Tindak Kekerasan	**17.701.968**	**13.387.399**	**4.314.569**	**75,63**
		Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	**17.701.968**	**13.387.399**	**4.314.569**	**75,63**
		Sub Kegiatan Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	17.701.968	13.387.399	4.314.569	75,63
		Program Rehabilitasi Sosial	**12.642.555.412**	**12.367.689.026**	**274.866.386**	**97,83**
		Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	**2.626.384.310**	**2.536.557.200**	**89.827.110**	**96,58**
		Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	1.096.125.000	1.094.940.000	1.185.000	99,89
		Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	59.206.720	58.752.600	454.120	99,23
		Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu	11.037.320	5.867.900	5.169.420	53,16
		Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	2.100.000	2.100.000	0	100
		Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	726.074.810	713.967.100	12.107.710	98,33
		Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	39.150.000	37.750.000	1.400.000	96,42
		Sub Kegiatan Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	1.330.000	1.330.000	0	100

NO.	JENIS BELANJA	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	SELISIH (Rp.)	%
		Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	3.620.460	2.792.100	828.360	77,12
		Sub Kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	540.545.000	510.335.000	30.210.000	94,41
		Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan	86.370.000	53.240.000	33.130.000	61,64
		Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	20.085.000	20.085.000	0	100
		Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan	40.740.000	35.397.500	5.342.500	86,89
		Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	**10.016.171.102**	**9.831.131.826**	**185.039.276**	**98,15**
		Sub Kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	538.297.600	525.359.070	12.938.530	97,60
		Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan	1.900.000	1.900.000	0	100
		Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	8.701.061.099	8.580.985.156	120.075.943	98,62
		Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	13.150.600	12.690.000	460.600	96,50
		Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu	413.002.773	393.345.750	19.657.023	95,24
		Sub Kegiatan Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	310.570	303.000	7.570	97,56
		Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	61.133.460	45.487.000	15.646.460	74,41
		Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	106.850.000	99.325.000	7.525.000	92,96

NO.	JENIS BELANJA	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	SELISIH (Rp.)	%
		Sub Kegiatan Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak	1.900.000	1.900.000	0	100
		Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	1.900.000	1.900.000	0	100
		Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	2.090.000	2.090.000	0	100
		Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	1.900.000	1.900.000	0	100
		Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan	2.950.000	2.950.000	0	100
		Sub Kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	169.725.000	160.996.850	8.728.150	94,86
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	**5.274.938.128**	**3.922.163.107**	**1.352.775.021**	**74,35**
		Kegiatan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	**40.233.510**	**13.244.750**	**26.988.760**	**32,92**
		Sub Kegiatan Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	12.636.930	4.717.000	7.919.930	37,33
		Sub Kegiatan Rujukan Anak-Anak Terlantar	12.760.000	1.425.000	11.335.000	11,17
		Sub Kegiatan Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	14.836.580	7.102.750	7.733.830	47,87
		Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	**5.234.704.618**	**3.908.918.357**	**1.325.786.261**	**74,67**
		Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	500.088.600	486.023.593	14.065.007	97,19

NO.	JENIS BELANJA	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	SELISIH (Rp.)	%
		Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	586.097.520	549.952.963	36.144.557	93,83
		Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	4.034.935.318	2.766.190.841	1.268.744.477	68,56
		Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	113.583.180	106.750.960	6.832.220	93,98
		Program Penanganan Bencana	**907.882.758**	**848.852.600**	**59.030.158**	**93,50**
		Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota	**747.128.820**	**697.449.600**	**49.679.220**	**93,35**
		Sub Kegiatan Penyediaan Makanan	425.150.200	421.492.400	3.657.800	99,14
		Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	73.817.570	64.190.000	9.627.570	86,96
		Sub Kegiatan Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	24.705.005	23.813.000	892.005	96,39
		Sub Kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	79.347.000	51.293.600	28.053.400	64,64
		Sub Kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial	144.109.045	136.660.600	7.448.445	94,83
		Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	**160.753.938**	**151.403.000**	**9.350.938**	**94,18**
		Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	92.590.720	85.495.000	7.095.720	92,34
		Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	68.163.218	65.908.000	2.255.218	96,69
Jumlah dan rata-rata %			**36.324.369.196**	**33.838.994.404**	**2.485.374.792**	**93,16**

LAMPIRAN 3

PENGUKURAN KINERJA DINAS SOSIAL KOTA SEMARANG
TAHUN 2022

DINAS SOSIAL KOTA SEMARANG

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA			PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	%		PAGU	REALISASI	%
Terwujudnya Pemerataan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Cakupan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang difasilitasi	66,67%	100%	150	1.06.02 Program Pemberdayaan Sosial 1.06.02.2.02 Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota 1.06.02.2.02.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	69.756.900	59.611.200	85,46
Terwujudnya Pemerataan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Cakupan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang difasilitasi	66,67%	100%	150	1.06.02 Program Pemberdayaan Sosial 1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota 1.06.02.2.03.01 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	5.255.644.098	5.164.170.920	98,26
Terwujudnya Pemerataan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Cakupan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang difasilitasi	66,67%	100%	150	1.06.02 Program Pemberdayaan Sosial 1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota 1.06.02.2.03.02 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	725.892.798	719.221.900	99,08

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA			PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	%		PAGU	REALISASI	%
Terwujudnya Pemerataan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Cakupan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang difasilitasi	66,67%	100%	150	1.06.02 Program Pemberdayaan Sosial 1.06.02.2.02 Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota 1.06.02.2.03.03 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	174.355.962	148.131.900	84,96
Terwujudnya Pemerataan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Cakupan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang difasilitasi	66,67%	100%	150	1.06.02 Program Pemberdayaan Sosial 1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota 1.06.02.2.03.04 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	467.429.198	420.333.781	89,92
Terwujudnya Pemerataan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Cakupan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang difasilitasi	66,67%	100%	150	1.06.02 Program Pemberdayaan Sosial 1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota 1.06.02.2.03.05 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	960.821.821	728.681.243	85,46

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA			PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	%		PAGU	REALISASI	%
Terwujudnya Pemerataan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	99,75%	100%	100,25	1.06.03 Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan 1.06.03.2.01 Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal 1.06.03.2.01.01 Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	17.701.968	13.387.399	75,63
Terwujudnya Pemerataan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	- Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani - Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	99,75% 100%	100% 100%	100,25 100	1.06.04 Program Rehabilitasi Sosial 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial 1.06.04.2.01.01 Penyediaan Permakanan	1.096.125.000	1.094.940.000	99,89
Terwujudnya Pemerataan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	- Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani - Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	99,75% 100%	100% 100%	100,25 100	1.06.04 Program Rehabilitasi Sosial 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial 1.06.04.2.01.02 Penyediaan Sandang	59.206.720	58.752.600	99,23

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA			PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	%		PAGU	REALISASI	%
Terwujudnya Pemerataan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	- Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani - Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	99,75% 100%	100% 100%	100,25 100	1.06.04 Program Rehabilitasi Sosial 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial 1.06.04.2.01.03 Penyediaan Alat Bantu	11.037.320	5.867.900	53,16
Terwujudnya Pemerataan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	- Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani - Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	99,75% 100%	100% 100%	100,25 100	1.06.04 Program Rehabilitasi Sosial 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial 1.06.04.2.01.04 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	2.100.000	2.100.000	100
Terwujudnya Pemerataan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	- Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani - Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	99,75% 100%	100% 100%	100,25 100	1.06.04 Program Rehabilitasi Sosial 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial 1.06.04.2.01.05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	726.074.810	713.967.100	98,33

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA			PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	%		PAGU	REALISASI	%
Terwujudnya Pemerataan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	- Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani - Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	99,75% 100%	100% 100%	100,25 100	1.06.04 Program Rehabilitasi Sosial 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial 1.06.04.2.01.06 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	39.150.000	37.750.000	96,42
Terwujudnya Pemerataan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	- Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani - Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	99,75% 100%	100% 100%	100,25 100	1.06.04 Program Rehabilitasi Sosial 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial 1.06.04.2.01.07 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	1.330.000	1.330.000	100
Terwujudnya Pemerataan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	- Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani - Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	99,75% 100%	100% 100%	100,25 100	1.06.04 Program Rehabilitasi Sosial 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial 1.06.04.2.01.08 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	3.620.460	2.792.100	77,12

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA			PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	%		PAGU	REALISASI	%
Terwujudnya Pemerataan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	- Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani - Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	99,75% 100%	100% 100%	100,25 100	1.06.04 Program Rehabilitasi Sosial 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial 1.06.04.2.01.09 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	540.545.000	510.335.000	94,41
Terwujudnya Pemerataan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	- Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani - Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	99,75% 100%	100% 100%	100,25 100	1.06.04 Program Rehabilitasi Sosial 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial 1.06.04.2.01.10 Pemberian Layanan Kedaruratan	86.370.000	53.240.000	61,64
Terwujudnya Pemerataan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	- Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani - Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	99,75% 100%	100% 100%	100,25 100	1.06.04 Program Rehabilitasi Sosial 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial 1.06.04.2.01.11 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	20.085.000	20.085.000	100

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA			PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	%		PAGU	REALISASI	%
Terwujudnya Pemerataan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	- Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani - Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	99,75% 100%	100% 100%	100,25 100	1.06.04 Program Rehabilitasi Sosial 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial 1.06.04.2.01.12 Pemberian Layanan Rujukan	40.740.000	35.397.500	86,89
Terwujudnya Pemerataan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	99,75%	100%	100,25	1.06.04 Program Rehabilitasi Sosial 1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial 1.06.04.2.02.01 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	538.297.600	525.359.070	97,60
Terwujudnya Pemerataan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	99,75%	100%	100,25	1.06.04 Program Rehabilitasi Sosial 1..06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial 1.06.04.2.02.02 Pemberian Layanan Kedaruratan	1.900.000	1.900.000	100

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA			PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	%		PAGU	REALISASI	%
Terwujudnya Pemerataan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	99,75%	100%	100,25	1.06.04 Program Rehabilitasi Sosial 1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial 1.06.04.2.02.03 Penyediaan Permakanan	8.701.061.099	8.580.985.156	98,62
Terwujudnya Pemerataan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	99,75%	100%	100,25	1.06.04 Program Rehabilitasi Sosial 1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial 1.06.04.2.02.04 Penyediaan Sandang	13.150.600	12.690.000	96,50
Terwujudnya Pemerataan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	99,75%	100%	100,25	1.06.04 Program Rehabilitasi Sosial 1..06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial 1.06.04.2.02.05 Penyediaan Alat Bantu	413.002.773	393.345.750	95,24

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA			PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	%		PAGU	REALISASI	%
Terwujudnya Pemerataan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	99,75%	100%	100,25	1.06.04 Program Rehabilitasi Sosial 1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial 1.06.04.2.02.06 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	310.570	303.000	97,56
Terwujudnya Pemerataan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	99,75%	100%	100,25	1.06.04 Program Rehabilitasi Sosial 1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial 1.06.04.2.02.07 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	61.133.460	45.487.000	74,41
Terwujudnya Pemerataan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	99,75%	100%	100,25	1.06.04 Program Rehabilitasi Sosial 1..06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial 1.06.04.2.02.08 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	106.850.000	99.325.000	92,96

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA			PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	%		PAGU	REALISASI	%
Terwujudnya Pemerataan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	99,75%	100%	100,25	1.06.04 Program Rehabilitasi Sosial 1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial 1.06.04.2.02.09 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	1.900.000	1.900.000	100
Terwujudnya Pemerataan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	99,75%	100%	100,25	1.06.04 Program Rehabilitasi Sosial 1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial 1.06.04.2.02.10 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	1.900.000	1.900.000	100
Terwujudnya Pemerataan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	99,75%	100%	100,25	1.06.04 Program Rehabilitasi Sosial 1..06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial 1.06.04.2.02.11 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	2.090.000	2.090.000	100

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA			PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	%		PAGU	REALISASI	%
Terwujudnya Pemerataan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	99,75%	100%	100,25	1.06.04 Program Rehabilitasi Sosial 1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial 1.06.04.2.02.12 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	1.900.000	1.900.000	100
Terwujudnya Pemerataan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	99,75%	100%	100,25	1.06.04 Program Rehabilitasi Sosial 1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial 1.06.04.2.02.13 Pemberian Layanan Rujukan	2.950.000	2.950.000	100
Terwujudnya Pemerataan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	99,75%	100%	100,25	1.06.04 Program Rehabilitasi Sosial 1..06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial 1.06.04.2.02.14 Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	169.725.000	160.996.850	94,86

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA			PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	%		PAGU	REALISASI	%
Terwujudnya Pemerataan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	99,75%	100%	100,25	1.06.05 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 1.06.05.2.01 Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar 1.06.05.2.01.01 Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	12.636.930	4.717.000	37,33
Terwujudnya Pemerataan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	99,75%	100%	100,25	1.06.05 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 1.06.05.2.01 Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar 1.06.05.2.01.02 Rujukan Anak-Anak Terlantar	12.760.000	1.425.000	11,17
Terwujudnya Pemerataan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	99,75%	100%	100,25	1.06.05 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 1.06.05.2.01 Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar 1.06.05.2.01.03 Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	14.836.580	7.102.750	47,87
Menurunnya angka kemiskinan	Menurunnya Angka DTKS	16,1%	11,06%	131,3	1.06.05 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 1.06.05.2.02.01 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	500.088.600	486.023.593	97,19

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA			PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	%		PAGU	REALISASI	%
Menurunnya angka kemiskinan	Menurunnya Angka DTKS	16,1%	11,06%	131,3	1.06.05 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 1.06.05.2.02.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	586.097.520	549.952.963	93,83
Terwujudnya Pemerataan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Cakupan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan sosial	69,15%	80,34%	116,18	1.06.05 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 1.06.05.2.02.03 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	4.034.935.318	2.766.190.841	68,56
Terwujudnya Pemerataan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Cakupan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan sosial	69,15%	80,34%	116,18	1.06.05 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 1.06.05.2.02.04 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	113.583.180	106.750.960	93,98
Terwujudnya Pemerataan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100%	100%	100	1.06.06 Program Penanganan Bencana 1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota 1.06.06.2.01.01 Penyediaan Makanan	425.150.200	421.492.400	99,14

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA			PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	%		PAGU	REALISASI	%
Terwujudnya Pemerataan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100%	100%	100	1.06.06 Program Penanganan Bencana 1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota 1.06.06.2.01.02 Penyediaan Sandang	73.817.570	64.190.000	86,96
Terwujudnya Pemerataan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100%	100%	100	1.06.06 Program Penanganan Bencana 1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota 1.06.06.2.01.03 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	24.705.005	23.813.000	96,39
Terwujudnya Pemerataan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100%	100%	100	1.06.06 Program Penanganan Bencana 1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota 1.06.06.2.01.04 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	79.347.000	51.293.600	64,64
Terwujudnya Pemerataan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100%	100%	100	1.06.06 Program Penanganan Bencana 1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota 1.06.06.2.01.05 Pelayanan Dukungan Psikososial	144.109.045	136.660.600	94,83

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA			PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	%		PAGU	REALISASI	%
Terwujudnya Pemerataan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100%	100%	100	1.06.06 Program Penanganan Bencana 1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota 1.06.06.2.02.01 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	92.590.720	85.495.000	92,34
Terwujudnya Pemerataan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100%	100%	100	1.06.06 Program Penanganan Bencana 1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota 1.06.06.2.02.02 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	68.163.218	65.908.000	96,69

Jumlah Pagu Anggaran Tahun 2022 : Rp. 36.324.369.196,00

Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2022 : Rp. 33.838.994.404,00